

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP PDRB DI KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

MASMA NOOR HARDIANSYAH BATUBARA

NPM 2021021008



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP PDRB DI KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

MASMA NOOR HARDIANSYAH BATUBARA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU EKONOMI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PDRB DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

Oleh

MASMA NOOR HARDIANSYAH BATUBARA

Desentralisasi kebijakan memberikan peluang besar bagi daerah untuk memperbaiki kondisi keuangan. Upaya peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan pembangunan perekonomian daerah, salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pendapatan lain yang sah merupakan sumber pendapatan lain yang diyakini untuk mendorong pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, dengan data sekunder Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah observasi penelitian. Penelitian dilakukan dengan data triwulan 1 sampai dengan 4 selama 9 tahun time series dari periode tahun 2014 : Triwulan 1 – 2023 : Triwulan 4. Data berbentuk time series sehingga metodologi yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dan Model Koreksi Kesalahan (ECM). Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan pada hubungan jangka panjang dan tidak berpengaruh pada hubungan jangka pendek terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan jangka panjang dan pendek terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan jangka panjang dan pendek terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, PROFIT SHARING FUNDS AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS ON GRDP IN PESISIR BARAT DISTRICT, LAMPUNG PROVINCE

By

MASMA NOOR HARDIANSYAH BATUBARA

Policy decentralization provides a great opportunity for regions to improve financial conditions. Efforts to increase regional income by paying attention to regional economic development, one of which is Regional Original Income (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), Special Allocation (DAK) and Regional Expenditure (BM) as well as other legitimate income is another source of income that is believed to encourage the government to increase economic growth and the needs of the community, especially the West Pesisir Regency area. This research is descriptive quantitative, with secondary data from West Pesisir Regency as the research observation area. The research was conducted with quarterly data 1 to 4 for 9 years time series from the period 2014: Quarter 1 - 2023: The data is in the form of time series so the methodology used is Ordinary Least Square (OLS) and Error Correction Model (ECM). The results showed that Regional Original Revenue (PAD) had a positive and significant effect on the long-term relationship and had no effect on the short-term relationship on Gross Regional Domestic Product (GRDP). Revenue Sharing Fund (DBH) has a positive and significant effect on the long-term and short-term relationship to Gross Regional Domestic Product (GRDP), Special Allocation Fund (DAK) has a positive and significant effect on the long-term and short-term relationship to Gross Regional Domestic Product (GRDP).

Keywords : Capital Expenditure, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund, Regional Original Revenue.

Judul Tesis : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PDRB DI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **MASMA NOOR HARDIANSYAH BATUBARA**

No. Pokok Mahasiswa : **2021021008**

Program Studi : **Magister Ilmu Ekonomi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**



Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M.
NIP. 19670710 199003 2001



Prof. Toto Gunarto, S.E., M.Si
NIP. 19560325 198303 1002

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi**



Dr. Asih Murwati, S.E., M.E.
NIP. 19740410 200812 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**



Sekretaris : **Prof. Toto Gunarto, S.E., M.Si**



Anggota : **Dr. Arivina Rathh Taher, S.E., M.Si**



Anggota : **Dr. Dedy Yullawan, S.E., M.Si**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP. 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian : **29 Mei 2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh – sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Mei 2024

Penulis



METERAN
TEMPEL
08307ALX192771632

**MASMA NOOR
HARDIANSYAH BATUBARA**

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Masma Noor Hardiansyah Batubara, penulis dilahirkan pada tanggal 08 Maret 1987 di Serdang Bedagai. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan bapak Mukhtar Batubara dan ibu Asmaliah. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di sekolah SD Negeri 106235 Paya Pinang dan lulus pada tahun 1999. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan pada tahun 2002 dari SMP Negeri 7 Tebing Tinggi. Kemudian penulis melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas SMAN Negeri 2 Tebing Tinggi dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan menyelesaikan pendidikan sarjana nya pada tahun 2011 bulan Juni. Pada bulan juli 2020 penulis melanjutkan pendidikan tingkat magister pada prodi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung.

MOTTO

“Tanpa Ilmu, Amal tidak ada gunanya. Ilmu tanpa amal adalah hal yang sia - sia ”

(Abu Bakar Ash Shiddiq)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin puji syukur kehadiran Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Saya persembahkan karya yang cukup sederhana ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati untuk :

Istri dan anak-anakku yang luar biasa, orang yang selalu sabar serta menjadi sumber inspirasiku dan telah memberikan dukungan tanpa syarat sepanjang waktu. Terima kasih juga kepada Mamakku yang tidak pernah jenuh memberikan doanya. Kalian adalah anugerah terindah yang tidak ternilai dalam hidupku. Kepada mentor dan dosen yang telah membimbingku, terima kasih atas ilmu dan wawasan yang telah kalian lakukan

Para Dosen Magister Ilmu Ekonomi dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, serta teman-teman yang senantiasa memberikan saran, motivasi, dan doa dalam mengerjakan tesis ini.

Tak lupa Almamater tercinta Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bismillahirrohmaanirrohim.

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penulis bisa merasakan segala nikmat dan anugerah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap PDRB Di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung**”

Adapun maksud dalam penulisan tesis ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.), pada Program Magister Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis telah banyak memperoleh bimbingan, bantuan serta motivasi dari semua pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku Dosen Pembimbing I Prof. Toto Gunarto, S.E.,M.Si. selaku Pembimbing II dan Ibu Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang begitu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan, kritik, ilmu dan sumbangan pemikiran dalam tesis ini.

5. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Arivina Ratih Taher, SE., M.M dan Bapak Dr Dedy Yuliawan, S.E.,M.Si selaku Dosen Penguji dan Pembahas, yang telah memberikan saran, arahan, tambahan ilmu sehingga tesis ini dapat selesai dengan hasil yang baik.
7. Istri dan anak- anakku yang selalu sabar dan mendoakanku.
8. Mamakku yang tiada putus selalu mendoakanku dan merestui setiap langkah untuk kebaikan anaknya di dnia dan akhirat.
9. Para Senior di Keluarga besar Pasca Sarjana FEB Unila Bang Dr Tanwir, Bung Boy serta kawan – kawan MIE 2020 atas kebersamaan dan kekompakan dalam belajar bersama dan ujian bersama. Keseruan kalian tak akan terlupakan.

Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terima kasih Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat. Amiiin...

Bandar Lampung, 29 Mei 2024

Penulis

**MASMA NOOR HARDIANSYAH
BATUBARA**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1 Tinjauan Pustaka	18
2.1.1 Kebijakan Fiskal dan <i>Fiscal Federalism</i>	18
2.1.2 Teori Keagungan	18
2.1.3 Teori <i>Stewardship</i>	19
2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	20
2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	21
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	23
2.3.1 Pengertian dan unsur-unsur APBD	23
2.3.2 Struktur APBD	25
2.4 Pendapatan Asli Daerah	27
2.5 Dana Bagi Hasil.....	30
2.6 Dana Alokasi Khusus.....	34
2.7 Penelitian Terdahulu.....	35
2.8 Kerangka Pemikiran Penelitian	41
2.9 Hipotesis Penelitian	44
III. METODELOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Data dan Sumber Data.....	46
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	46
3.2.1 Variabel Penelitian.....	46

3.2.2 Definisi Operasional Variabel	48
3.3 Metode Statistik Penelitian.....	48
3.3.1 Uji <i>Stasionary</i> : Uji Akar Satuan (<i>Unit Root Test</i>).....	49
3.3.2 Uji Kointegrasi.....	50
3.4 Uji Asumsi Klasik	51
3.4.1 Uji Normalitas	51
3.4.2 Uji Multikolinearitas.....	52
3.4.3 Uji Heterokedastisitas	52
3.4.4 Uji Autokorelasi	53
3.5 Ordinary Last Square (OLS).....	53
3.6 <i>Error Correction Model (ECM)</i>	54
3.7 Pengujian Hipotesis Penelitian	55
3.7.1 Uji t (<i>t-test</i>)	55
3.7.2 Uji F Statistik.....	56

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian	58
4.4.1 Gambaran Umum	58
4.2 Hasil Penelitian.....	59
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	59
4.3 Hasil Pengujian Ordinary Least Square (OLS) dan Error Correction Model (ECM)	62
4.3.1 Hasil Uji Stasioner	62
4.3.2 Hasil Uji Kointegrasi	63
4.4 Uji Asumsi Klasik	64
4.4.1 Uji Normalitas	64
4.4.2 Uji Multikolineritas.....	66
4.4.3 Uji Heterokedastisitas	66
4.4.4 Uji Autokorelasi.....	67
4.5 Hasil Estimasi Jangka Panjang <i>Ordinary Least Square Model (OLS)</i>	68
4.6 Hasil Estimasi Jangka Pendek <i>Error Correction Model (ECM)</i>	69
4.7 Uji Hipotesis.....	72
4.7.1 Uji t-Statistik.....	72
4.7.2 Hasil Uji F- Statistik	74
4.8 Hasil dan Pembahasan.....	75

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tinjauan Empiris Penelitian.....	35
2. Variabel, Simbol, satuan dan Sumber Data	48
3. Statistik Deskriptif antar Variabel	60
4. Hasil Uji Stasioner (<i>Unit Root Test</i>) Pada Tingkat Level.....	62
5. Hasil Uji Stasioner (<i>Unit Root Test</i>) Pada Tingkat <i>First Difference</i>).....	63
6. Hasil Uji Kointegrasi Engel-Granger (EG).....	64
7. Uji Multikolinieritas	66
8. Uji Heterokedastisitas	66
9. Uji Autokolerasi.....	67
10. Hasil Estimasi Jangka Panjang <i>Ordinary Least Square Model</i> (OLS)	68
11. Hasil Estimasi Jangka Pendek <i>Error Correction Model</i> (ECM)	70
12. Hasil Uji t pada tingkat signifikansi 95% dan $df = 36$	72
13. Hasil Uji F pada tingkat signifikansi 95% dan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 37$	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rata-rata PDRB Lapangan Usaha atas dasar harga konstan 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2023	5
2. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2023.....	8
3. Rata-rata Dana bagi hasil (DBH) 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2023.....	10
4. Rata-rata Dana alokasi khusus (DAK) 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2023	12
5. Kerangka Pemikiran.....	42
6. Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Barat	59
7. Grafik Histogram Uji Normalitas Dalam Jangka Panjang.....	65
8. Grafik Histogram Uji Normalitas Dalam Jangka Pendek.....	65
9. Perbandingan pergerakan PDRB dan PAD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014-2023.....	77
10. Rata-rata perbandingan kontribusi 3 variabel Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014-2023	78
11. Perbandingan pergerakan PDRB dan DBH Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014-2023.....	82
12. Rata-rata perbandingan kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014-2023	83
13. Perbandingan pergerakan PDRB dan DAK Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014-2023.....	86
14. Rata-rata perbandingan kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014-2023.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dapat dikatakan sebagai proses pengembangan yang mendukung penyelenggaraan negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tingkat pembangunan suatu negara dapat mengindikasikan kemajuan dan perkembangan negara tersebut, (Kusumawati & Wiksuana, 2018). Beberapa indikator sebagai penentu pembangunan nasional terdiri atas pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, indeks kualitas hidup, urbanisasi dan indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan (Indriyani & Wahyudi, 2021). Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai indikator penting dalam menganalisis pembangunan nasional yang terjadi dalam suatu negara dan menjadi perhatian pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuat kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). (Todaro, 2000) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan mengalokasikan secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat meratakan

pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.

Di Indonesia Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada pemahaman bahwa daerah itu sendiri lebih akrab dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Menurut (Bastian, 2010), dengan desentralisasi yang sedang diterapkan di Indonesia saat ini, ada kesempatan bagi daerah dalam hal pengelolaan fiskal. Pemerintah pusat dan daerah kini memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan layanan publik yang sebelumnya terabaikan. Dengan pengelolaan dana fiskal yang bijaksana, diharapkan ketertinggalan di daerah-daerah tertentu dapat diminimalisir. Sistem ini diharapkan dapat mencapai pengelolaan keuangan yang tertib, patuh pada hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sambil memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, serta kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah tersebut dalam membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah setiap pemerintah daerah perlu memberikan peningkatan terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya secara demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan (Firda Monica dkk, 2022).

Dengan adanya otonomi maka desentralisasi pun terjadi, baik yang menyangkut perencanaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi dan perencanaan lainnya. Dari segi pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan agar pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan daerah tersebut. Salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam hubungannya dengan kebijakan keuangan adalah desentralisasi fiskal untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan dorongan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Oleh karena itu desentralisasi fiskal harus menuntun kepada alokasi sumber-sumber daya yang lebih efisien dan diharapkan secara positif dapat dihubungkan dengan pertumbuhan

ekonomi dalam PDB per kapita yang sebenarnya sebagai suatu keseluruhan (Sun'an dan Senuk, 2015).

Pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah dan dapat pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi daerahnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Menurut (Aryanto, 2011), desentralisasi kebijakan memberikan kesempatan besar bagi daerah-daerah untuk meningkatkan kondisi keuangan. Otoritas local mengatur dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Dalam rangka mendukung desentralisasi fiskal pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada setiap daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

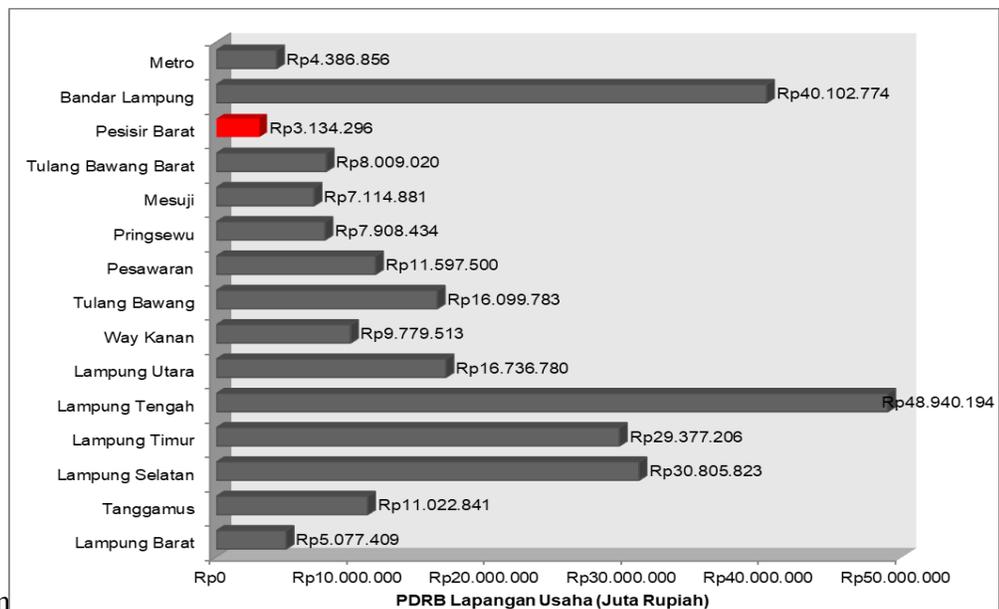
Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan perekonomian daerah salah satunya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diyakini akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan dari

pemerintah daerah provinsi, serta lain-lain pendapatan yang sah merupakan sumber penerimaan lain yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. Namun, penelitian ini berfokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan penelitian sebelumnya (Azis et al., 2022; Islami & Nababan, 2020; Megasari & Wahidahwati, 2022; Sucipto, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas (1) dana bagi hasil (DBH), (2) dana alokasi umum (DAU), (3) dana alokasi khusus (DAK). Ketiga macam dana perimbangan tersebut merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan saling melengkapi dan mengisi. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Sasaran utama desentralisasi adalah dapat membantu mempercepat perkembangan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 di daerah serta desentralisasi fiskal merupakan sebuah solusi agar pemerintah dapat lebih efisien dalam menjalankan roda pemerintahannya dari tingkat yang lebih rendah (*trickle down effect*). Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004, sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2) Dana Perimbangan, dan (3) Pendapatan lain-lain yang sah.

Kaitan desentralisasi fiskal dengan PDRB dapat dijelaskan dari beberapa teori bahwa desentralisasi fiskal membuat pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi dan preferensi kebutuhan masyarakat dibanding dengan pemerintah yang terpusat agar tercipta sebuah kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal mempunyai peran penting dalam proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Pembangunan wilayah yang terus berkelanjutan tidak terlepas dari pengukuran untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan salah satu indikator penting, jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (BPS, 2016). Pada penelitian ini berfokus pada salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, dalam kaitan perkembangan PDRB yang ada untuk melihat Perbandingan antar 15 Kabupaten/Kota disajikan pada data berikut:



Gambar 1. Perbandingan PDRB Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)

15

Gambar 1, memperlihatkan bagaimana pergerakan perekonomian 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung, terlihat dari rata-rata 3 wilayah PDRB paling tinggi adalah wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 48.940.194, Kota Bandar Lampung sebesar Rp 40.102.774 dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp 30.805.823. Disisi lain rata-rata 3 wilayah dengan PDRB terendah pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat sebesar Rp 3.134.296, Kota Metro sebesar Rp 4.386.856 dan Kabupaten Mesuji sebesar Rp 7.114.881. Hasil perbandingan perekonomian pada gambar diatas menunjukkan masing-masing pergerakan rata-rata perekonomian sepanjang tahun

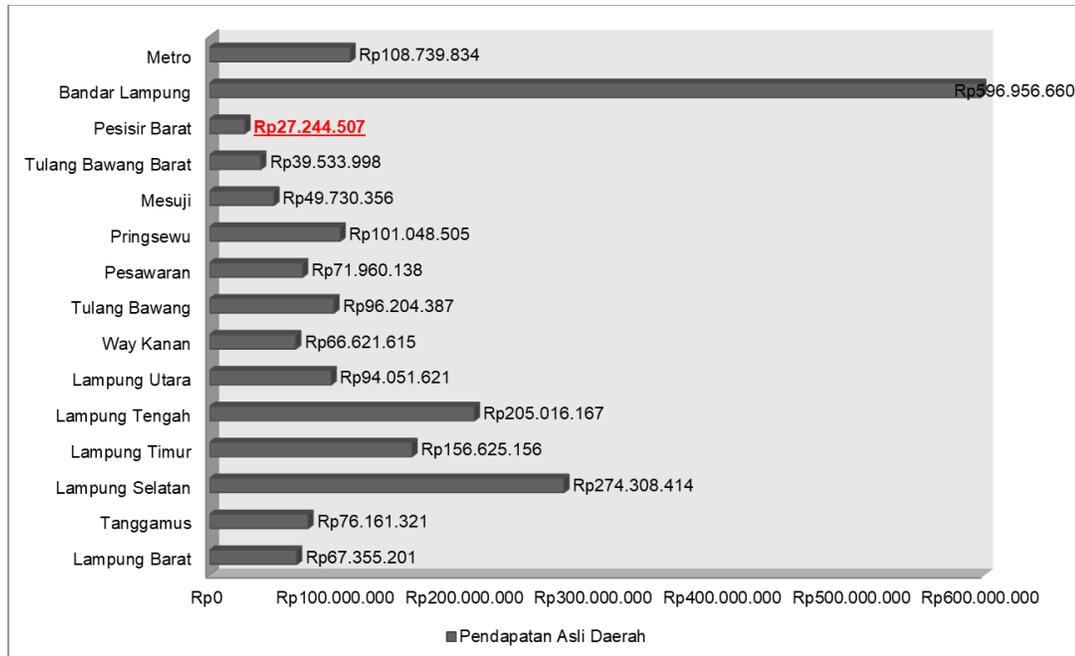
2018-2023, point penting yang akan diambil pada gambar tersebut adalah pada wilayah PDRB terendah yaitu wilayah Pesisir Barat.

Kabupaten Pesisir barat adalah wilayah otonom baru di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat secara resmi berdiri sejak tahun 2012 berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364). Sebelum lahirnya Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, Kabupaten Pesisir Barat masih termasuk wilayah pemerintahan Kabupaten Lampung Barat yang ibukota kabupatennya di Liwa. Sebagai wilayah baru dugaan awal rendahnya PDRB Kabupaten Pesisir Barat dapat diklaim bahwa belum berkembangnya instrument belanja pemerintah dan pergerakan perekonomian suatu wilayah.

Salah satu instrument penting berkembangnya daerah adalah dengan pengalokasian dana Perimbangan yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Menurut (Jin dan zhang 2011), Belanja pemerintah daerah yang produktif dapat meningkatkan rasio output terhadap modal (*the ratio of output to capital*), sedangkan belanja pemerintah yang belum/tidak produktif dapat mengurangi rasio output terhadap modal.

Nasution, (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran pemerintah daerah, dan tenaga kerja. PAD, DAU, DBH, Pengeluaran pemerintah daerah dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB. (Vidyattama, 2010), melakukan penelitian mengenai mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia. Belanja pemerintah daerah dan dana perimbangan seperti PAD, DBH, DAK, DAU dan berbagai pengeluaran pemerintah sangat berperan penting dalam perekonomian hal ini menunjukan adanya pengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB di Indonesia.

Kabupaten Pesisir Barat memiliki PDRB terendah antar 15 Kabupaten/Kota dan wilayah yang masih berkembang, dapat dikatakan kabupaten pesisir barat dalam masalah dana perimbangan masih fokus dan dibantu oleh beberapa dana perimbangan pusat. Baru berkembangnya wilayah Pesisir Barat juga dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Mulyanto, 2007). Selain itu, PAD juga dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha, baik milik pemerintah atau swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut, maka daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah diatur dalam undang-undang. Berikut adalah rincian perbandingan Pendapatan asli daerah (PAD) antar Kabupaten/kota di Provinsi Lampung:

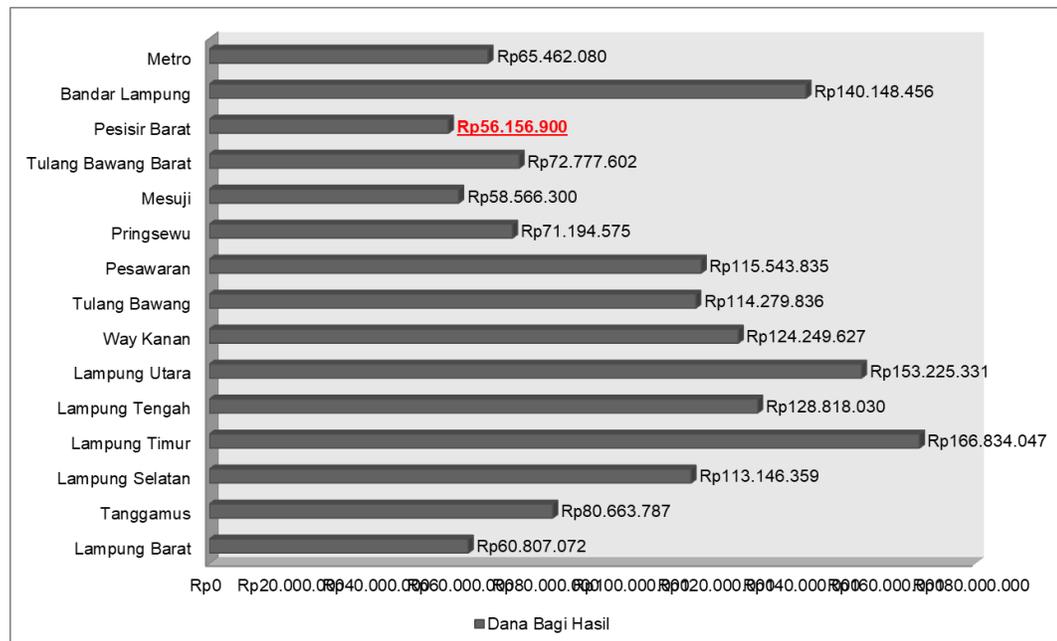


Gambar 2. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2023

Dari gambar 2, secara singkat dapat dijelaskan bahwa PAD Tertinggi: adalah pada wilayah Bandar Lampung dengan Rp596.956.660. Pendapatan Terendah: Pesisir Barat dengan Rp27.244.507. jika dilihat dari perbandingan kontribusi Bandar Lampung memberikan 25,43% dan Pesisir Barat hanya memberikan 1,16% terhadap provinsi Lampung. terlihat bahwa Bandar Lampung memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PAD keseluruhan Lampung, sementara Pesisir Barat memberikan kontribusi yang relatif kecil. Pesisir Barat sebagai wilayah otonomi yang baru berdiri bisa dikatakan masih harus dikembangkan Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan investasi dapat meningkatkan PAD suatu wilayah. (Anggoro, 2017), Pendapatan asli daerah sangatlah penting, terutama untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dimana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi yang telah dilimpahkan atau diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat. Kedudukan pendapatan asli daerah sangatlah strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu dari beberapa faktor tinggi rendahnya PAD, adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak pendapatan penduduk yang beragam sehingga penduduk berpenghasilan rendah cenderung mengurangi konsumsi atas barang dan jasa yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah sehingga menyebabkan tinggi rendahnya dan dampaknya kepada PAD, (Prasetyo et al., 2022). Pajak daerah sesuai UU HKPD memiliki jumlah objek pajak yang luas dan disesuaikan dengan berbagai macam industri yang ada di daerah sesuai yang tertuang UU HKPD seperti pajak hotel pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame Tentunya dalam mengumpulkan pajak daerah, pemerintah juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal kesadaran membayar pajak, (Fuad dan Hapsari, 2020). Pengaruh yang signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola dana yang ditempatkan pada BUMD, lembaga perbankan dan non perbankan serta investasi lain karena hasil pengelolaan kekayaan daerah berbentuk bagian laba. Hal ini dibuktikan dari berbagai penelitian yang memiliki hasil yang berbeda. (Apriani et al, 2017) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap rendah dan tingginya PAD.

Salah satu dana perimbangan yang diberikan pusat adalah Dana Bagi yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Berikut adalah rincian perbandingan Dana bagi hasil (DBH) antar Kabupaten/kota di Provinsi Lampung:



Gambar 3. Rata-rata Dana bagi hasil (DBH) 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2023 (Milliar Rupiah)

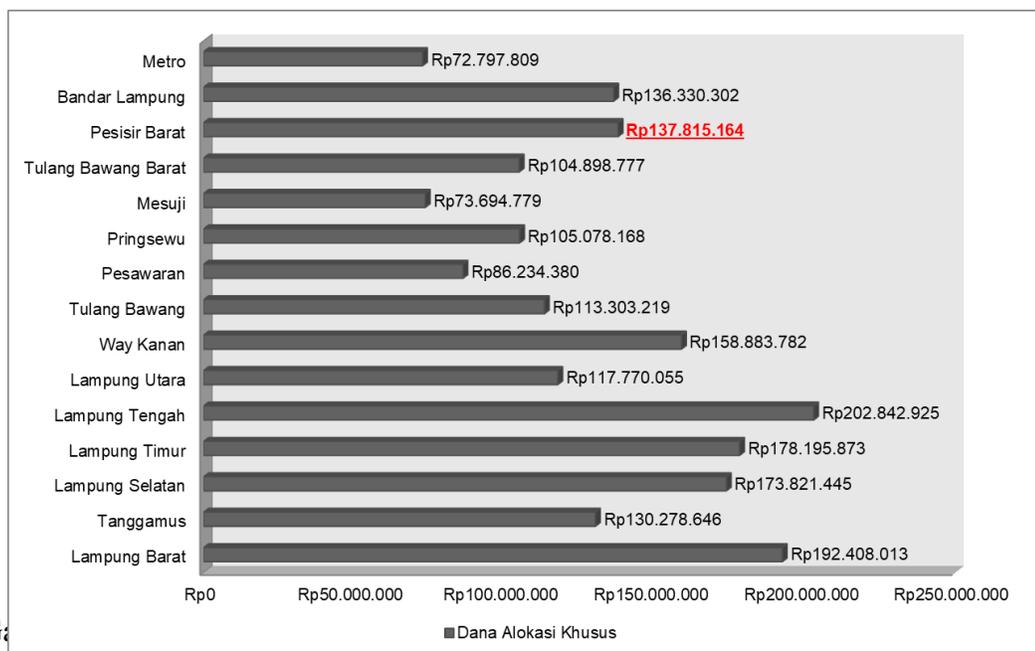
Dari gambar diatas secara singkat dapat dijelaskan bahwa DBH Tertinggi: Lampung Timur dengan Rp166.834.047. DBH Terendah: Pesisir Barat dengan Rp56.156.900. jika dilihat dari perbandingan kontribusi Lampung Timur memiliki 10,09% dan Pesisir Barat hanya memberikan 3,40% dari perbandingan kontribusi seluruh kabupaten/kota di provinsi Lampung. terlihat bahwa Lampung Timur masih memiliki tingkatan dana bagi hasil yang tinggi, dan Pesisir Barat sebagai wilayah otonomi yang baru cenderung masih memiliki perkembangan dana bagi hasil yang sangat rendah hal ini juga menandakan transfer dana pusat ke wilayah Pesisir Barat masih cenderung rendah.

Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya,

dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen Dana Bagi Hasil, kecuali Dana Bagi Hasil perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran Dana Bagi Hasil baik pajak maupun sumber daya alam dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Dana Bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil sumber daya alam. Dimana Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan serta cukai hasil tembakau merupakan komponen dari Dana Bagi Hasil Pajak. Sedangkan Dana Bagi Hasil sumber daya alam terdiri dari kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan.

Menurut (Putra, dkk, 2015) Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang. Dana tersebut kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah berdasarkan prinsip *by origin*, dimana daerah penghasil mendapat lebih banyak dana. DBH yang ditransfer pusat ke daerah maka dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar porsi yang diperoleh daerah penghasil maka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas. Hal ini sesuai teori transfer unconditional grant yaitu transfer tanpa syarat dan sesuai kajian empiris yang dilakukan oleh (Mokorowu, 2020), menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Disisi lain demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah sebagai pemegang kendali dalam hal anggaran dan pengelolaannya terasuk bagi masing-masing daerah (Waryanto, 2017). Dimana daerah tersebut akan saling berbeda untuk dapat mengelola pendanaan urusannya yang akan mengakibatkan ketimpangan fiskal disetiap daerah. Sebagai solusi dalam menghadapi kondisi itu, dibagikan dana dari APBN untuk pemerintah khususnya daerah yang salah satu bentuk pengalokasian dana itu adalah danna bagihasil (DBH) yang sumbernya timbul dari kekayaan daerah dan juga pajak sebagai alokasi pendanaan untuk keperluan daerah mewujudkan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Menurut (Halim, 2014) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berikut adalah rincian perbandingan Dana alokasi khusus (DAK) antar Kabupaten/kota di Provinsi Lampung:



Gambar 1. Perbandingan Dana Alokasi Khusus (DAK) antar Kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2023 (Miliar)

Pada gambar diatas dijelaskan bagaimana perbandingan DAK antar wilayah, DAK terlihat dimana Lampung Tengah memiliki jumlah DAK tertinggi sebesar Rp 202.842.925, sedangkan melihat posisi Pesisir Barat masuk kedalam tertinggi ke enam dari 15 kabupaten kota sebesar Rp 137.815.164, Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pada umumnya diperuntukkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan daerah yang merupakan prioritas nasional untuk mendorong tercapainya

standar pelayanan minimum pada urusan publik yang menjadi prioritas nasional misalkan dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastuktur yang urusannya telah didesentralisasikan ke daerah (dsfindonesia, 2010). Menurut Pasal 23 UU 33/2004 DBH pembagiannya dilakukan berdasarkan prinsip by origin. Maksudnya penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Jenis-jenis DBH meliputi DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak penghasilan dan Cukai Hasi Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.

Dalam kasus pembentukan wilayah otonom baru seperti Kabupaten Pesisir Barat, seringkali butuh waktu untuk melihat perkembangan ekonomi dan belanja pemerintah di wilayah tersebut. Proses pembentukan otonomi baru sering kali merupakan langkah awal untuk mengakomodasi potensi dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut secara lebih baik. Dalam hal ini, upaya pemerintah daerah dan dukungan dari pemerintah pusat dapat menjadi kunci dalam mempercepat perkembangan ekonomi dan belanja pemerintah di Kabupaten Pesisir Barat. Dengan adanya dorongan yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan Kabupaten Pesisir Barat dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sumber pendapatan penting bagi kabupaten seperti Pesisir Barat, makanya perlunya analisis jangka panjang dan jangka pendek tentang bagaimana pengaruh perkembangan PAD, DBH dan DAK dalam membantu perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Barat. maka penulis tertarik untuk meneliti kajian dengan judul **“Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Terhadap PDRB Di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan untuk dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai Keadaan dana perimbangan Kabupaten Pesisir Barat apakah mampu untuk menggerakkan perekonomian daerah secara jangka panjang dan jangka pendek. Maka diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pesisir terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimanakah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dana bagi hasil (DBH) Kabupaten Pesisir terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat?
3. Bagaimanakah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Pesisir terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan pengembangan ekonomi daerah khususnya Kabupaten Pesisir Barat baik dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan rujukan untuk penelitian-penelitian mengenai analisis dana perimbangan untuk perekonomian khususnya jika terbentuknya wilayah baru dimasa yang akan datang, dan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pesisir terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dana bagi hasil (DBH) Kabupaten Pesisir terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat.

3. Untuk menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Pesisir terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang ekonomi terkhusus ekonomi makro yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menentukan arah kebijakan fiskal di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kebijakan Fiskal dan *Fiscal Federalism*

Teori transfer fiskal seperti yang dikemukakan oleh (Litvack, et al, 1998) dalam (Arham, Kamuli dan Payu, 2018), bahwa desain transfer akan mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal karena akan berdampak pada efisiensi dan keadilan serta pemerataan pendistribusian barang publik. Menurut (Rosen, 2002), transfer fiskal terdiri atas unconditional grant (transfer tanpa syarat) dan conditional grant (transfer dengan syarat). Unconditional grant merupakan jenis transfer yang ditujukan guna menjamin pemerataan dalam kemampuan fiskal antardaerah, sehingga daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri. Contoh transfer tak bersyarat Indonesia adalah DBH dan DAU (Hastuti 2018). Conditional grant merupakan jenis transfer khusus yang diberikan kepada daerah untuk tujuan khusus atau membiayai kegiatan-kegiatan penting pemerintah pusat. Contoh transfer bersyarat di Indonesia adalah DAK (Hastuti 2018). Berdasarkan teori federalisme fiskal yang dikembangkan oleh Hayek, Musgrave dan Oates dalam (Kresnandra, 2016), dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah guna mengurus daerahnya sendiri yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Selanjutnya teori Oates (1972, 2011) dan Tiebout (1956) dalam Rustan (2013) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang positif dengan perekonomian.

(Oates, 1972) menyatakan bahwa fiscal federalism adalah sektor publik dengan tingkat pengambilan keputusan yang tersentralisasi dan terdesentralisasi di mana pilihan dibuat di setiap tingkat tentang penyediaan layanan publik yang sangat ditentukan oleh permintaan penduduk untuk memenuhi layanan tersebut. Desentralisasi fiskal menurut (Martinez-Vazquez et al, 2017) berkaitan dengan bagaimana sektor publik diatur dan bagaimana menciptakan peluang pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Tata kelola yang terdesentralisasi dapat memulihkan kepercayaan dalam kebijakan publik dan memberikan dasar untuk konsensus kebijakan yang lebih luas. Pada teori fiscal federalism yang lebih tradisional (Hayek, 1945) ditekankan adanya keuntungan alokasi sumber daya atas dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi fiskal pada prinsipnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Oates, 1993).

Hal ini diperkuat teori bahwa pendelegasian fiskal kepada pemerintah yang berada di level bawah lebih memiliki kedekatan dengan masyarakat dan keunggulan informasi jika dibandingkan dengan perumusan kebijakan secara sentralisasi, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di wilayahnya (Wibowo, 2008). Selanjutnya, (Pepinsky & Wihardja, 2011) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memperkuat kebijakan regional yang inovatif untuk menanggapi permintaan pasar sehingga menarik investasi. Pentingnya bantuan pendanaan belanja modal disebabkan oleh adanya perbedaan kapasitas fiskal yang spesifik pada setiap daerah. Variasi dalam kapasitas fiskal menyebabkan mobilisasi produksi atas tenaga kerja dan modal. Hal ini mengarah pada pemerataan dana transfer yang tidak efisien (Aritenang, 2019).

Oleh karena itu, dana transfer dari pemerintah pusat yang spesifik untuk belanja modal akan sangat penting untuk menetapkan keseragaman standar minimum atas infrastruktur publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan raya lintas wilayah. Selain itu, peran pemerintah pusat sangat penting, karena dukungan keuangan dari pemerintah pusat dalam hal investasi infrastruktur daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki kapasitas keuangan yang lebih besar (Zheng et al., 2015).

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan dan melakukan belanja daerah untuk prioritas dan kebutuhan daerah dengan prinsip bahwa anggaran yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan publik dan menjadi penggerak roda perekonomian di daerah. Manajemen penerimaan dan pemerintah menjadi prioritas dalam tercapainya masyarakat yang sejahtera dan mengurangi angka kemiskinan.

2.1.2 Teori Keagenan

Hubungan dua pihak dan agen merupakan teori dasar teori keagenan, dimana agen adalah pihak yang dipercaya dan diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan, dan principal adalah orang yang memberi kekuasaan. Mengawasi dan mengevaluasi tugas yang dilakukan oleh agen. Perbedaan kepentingan ini akan menimbulkan benturan kepentingan. Agen memiliki informasi lebih banyak dari pada principal. Yang dapat menimbulkan tindakan atau tindakan yang menguntungkan dirinya. Tindakan yang bisa dilakukan atas keinginan dan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan usaha dan kepentingannya, (Bonner, Rivera, & Zimmerman, B. J., 1997). Prinsipal dalam hal ini akan kesulitan mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh pihak agen. Didalam sektor publik, hubungan keagenan dalam hal ini antara legislatif dan eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif bertindak sebagai pihak prinsipal, sedangkan eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah daerah atau bertindak sebagai pihak agen. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah disetujui dan disahkan serta sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan dijadikan kontrol oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif dalam mengawasi dan meninjau kinerja pemerintah daerah. Penyerahan sepenuhnya penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai dan mencukupi kebutuhan daerahnya.

2.1.3 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* dikemukakan oleh (Donaldson & Davis, 1991) dan berpendapat bahwa “individu, sebagai penatalayan, diasumsikan secara intrinsik termotivasi untuk bekerja pada orang lain atau organisasi untuk menyelesaikan berbagai tugas yang dipercayakan kepada mereka” (Obermann *et al.*, 2020). Lebih lanjut, teori ini sepakat bahwa penatalayan mempunyai pendekatan kolektivistik, dan karenanya mereka pro-organisasi, tidak seperti pendekatan individualistis dimana individu diasumsikan egois (Sama *et al.*, 2022). Oleh karena itu, seorang penatalayan berupaya untuk mengedepankan manfaat yang lebih besar bagi organisasi dan masyarakat. Para ahli secara signifikan menganggap teori ini sebagai kerangka kerja yang menentukan motivasi perilaku individu (Davis *et al.*, 2018; Wasserman, 2006). Dalam konteks organisasi, teori *stewardship* diharapkan menunjukkan sikap peduli terhadap masa depan organisasinya (Hernandez, 2008).

Teori *stewardship* disajikan sebagai alternatif (beberapa orang mungkin mengatakan “pelengkap”) untuk menekankan kerjasama dan kolaborasi (Harrison, 2023), dan memberikan premis non-ekonomi untuk menjelaskan hubungan. Teori *stewardship* menyatakan akan bersedia untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan akan bertindak dengan cara tertentu yang mengarah pada utilitas kolektif/organisasi daripada manfaat yang mementingkan diri sendiri. Teori *stewardship* ditandai dengan gagasan pelayanan untuk orang lain dan bukan kepentingan pribadi (Jankauskas, 2022). Beberapa komentator melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa teori ini “mengasumsikan komitmen terhadap kesejahteraan, pertumbuhan dan keutuhan orang lain, (Keay, 2017).

Stewardship Theory merupakan suatu teori yang menjelaskan situasi dimana para manajer tidak termotivasi terhadap tujuan individu namun lebih termotivasi pada tujuan hasil utama organisasi demi kepentingan bersama, teori ini sebenarnya memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang sedemikian rupa dimana stewardship diperankan oleh para eksekutif yang termotivasi agar bertindak sesuai

kemauan principal, akan tetapi karena perilaku steward bertujuan untuk mencapai tujuan organisasinya sehingga steward tidak akan meninggalkan organisasinya.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Ricardo dalam (Jhingan, 2016), bahwa faktor tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam perekonomian, dimana tenaga kerja sebagai faktor utama, di samping faktor modal yang dimiliki. Teori Neoklasik (Solow-Swan) dalam Arsyad (2015), pertumbuhan perekonomian tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan teori ekonomi, dimana strategi dalam memperbaiki tenaga kerja, pengangguran maupun kemiskinan yaitu dengan menciptakan perekonomian yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Perekonomian berkualitas mampu menyediakan kesempatan orang untuk bekerja yang lebih besar dengan menarik pihak investor untuk berinvestasi pada pembangunan padat tenaga kerja (Arsyad, 2015).

Berdasarkan teori Keynes (1883-1946) dalam Mulyadi (2003), perekonomian dilandasi pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium), sehingga semua sumber daya termasuk tenaga kerja akan digunakan secara penuh (full-employed). Suparmoko dan Maria (2000) dalam Sinaga (2005) bahwa teori permintaan dan penawaran akan tenaga kerja secara prinsip berhubungan dengan tingkat upah, yaitu upah yang minta tinggi, maka jumlah tenaga kerja (lowongan kerja) yang diperlukan akan berkurang, begitu juga sebaliknya. Todaro (2003) mengemukakan bahwa penyerapan tenaga kerja diartikan penerimaan orang yang bekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga dapat tergambar dengan jelas keadaan ketersediaan lowongan kerja yang akan diisi oleh pencari kerja.

Menurut teori Keynes, konsep pendapatan nasional berupa permintaan agregat meliputi konsumsi rumah tangga masyarakat (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) serta kegiatan ekspor dan impor (X-M). Secara matematis dirumuskan dalam persamaan $Y = C + I + G + (X-M)$. Berdasarkan teori ini, campur

tangan pemerintah berupa pengeluaran (G) menjadi variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional (Duamiry, 2006). RostowMusgrave (Aladejare, 2013) menyatakan belanja pemerintah memiliki nilai yang besar ketika memulai pelaksanaan pembangunan. Ketika melaksanakan pembangunan, yang pertama kali disiapkan adalah pembangunan infrastruktur fisik untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadikan biaya awal pembangunan akan memiliki nilai yang besar. Menurut Hukum Wagner (Wagner's Law) (1978) (Dluhosch & Zimmermann, 2006) peran dan belanja pemerintah (government expenditure) akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Solikin, 2018). Ketika suatu wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal ini meningkatkan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa publik sehingga peran pemerintah dalam hal penyediaan layanan akan semakin besar (Aladejare, 2013). Dari pola ini, maka belanja pemerintah pusat melalui transfer keuangan dan dana desa terus menerus meningkat dari tahun ke tahun.

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tujuan utama dari perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah ingin melihat apakah kondisi perekonomian membaik atau tidak. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi yang diteliti adalah pertumbuhan ekonomi regional. Ukuran baik buruknya dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan, sebab tanpa pertumbuhan ekonomi, tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktifitas dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga untuk mempersiapkan perekonomian menjalani kemauan selanjutnya. Ada 4 manfaat perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam konteks ekonomi makro:

1. Pertumbuhan dapat meningkatkan kesejahteraan

Rakyat dikatakan makin sejahtera jika setidaknya-tidaknya output perkapita meningkat. Dalam ekonomi makro, tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan PDRB perkapita, yaitu PDRB dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Makin tinggi

PDB perkapita, makin sejahtera rakyatnya. Agar PDRB perkapita terus meningkat, maka perekonomian harus terus tumbuh dan harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk suatu adalah 2%, maka pertumbuhan PDRB harus lebih besar dari 2% per tahun.

2. Pertumbuhan dapat meningkatkan kesempatan kerja

Mengingat manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam proses produksi, maka dapat dikatakan kesempatan kerja meningkat bila output meningkat.

3. Pertumbuhan dapat memperbaiki distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan yang baik adalah distribusi pendapatan yang makin merata. Tetapi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah pemerataan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi banyak akan menghasilkan perbaikan distribusi pendapatan apabila memenuhi setidaknya dua syarat yaitu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas. Dengan meluasnya kesempatan kerja, maka akses rakyat untuk memperoleh penghasilan makin besar. Jika alat utama yang digunakan untuk perbaikan distribusi pendapatan adalah mekanisme pasar, maka supaya dapat bertahan di pasar, pekerja harus meningkatkan produktivitasnya.

4. Pertumbuhan dapat menyiapkan tahapan pembangunan selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tangga untuk mencapai tahapan kemajuan ekonomi selanjutnya. Sebuah perekonomian yang mampu terus tumbuh dalam jangka panjang, umumnya telah memiliki kemampuan untuk menjadi modern. Untuk menunjang pertumbuhan jangka panjang, yang dibutuhkan bukan saja tenaga kerja, bahan baku dan teknologi, akan tetapi kelembagaan-kelembagaan ekonomi dan sosial yang modern, misalnya pasar, keuntungan, uang, hak milik, kepastian hukum dan demokrasi.

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah atau regional secara konvensional diukur sebagai peningkatan persentase dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai

barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun atau pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci. PDRB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan umumnya dihitung dalam nilai riil dengan tujuan untuk menghilangkan adanya pengaruh inflasi dalam harga barang dan jasa yang diproduksi sehingga PDRB riil semata-mata mencerminkan perubahan kuantitas produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur pendapatan total atau pengeluaran total atas berbagai barang dan jasa, sedangkan PDRB per kapita mengukur pendapatan atau pengeluaran rata-rata perorangan dari perekonomian di negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, PDRB per kapita merupakan ukuran tingkat kesejahteraan rata-rata individu. Namun, harus diakui bahwa PDRB bukanlah ukuran kesejahteraan yang sempurna karena ada beberapa hal penting yang tidak dapat diukur oleh PDRB, yaitu:

1. PDRB tidak memperhitungkan kemerosotan lingkungan yang terjadi pada suatu daerah jika perusahaan-perusahaan terpacu meningkatkan produksi tanpa mengindahkan kualitas lingkungan. Pertambahan barang dan jasa tidak akan sebanding dengan kerusakan lingkungan atau tercemarnya air dan udara.
2. PDRB tidak mampu mengukur nilai berbagai hal penting yang tidak masuk ke pasar seperti pengurusan rumah, pengasuhan anak, kerja bakti sukarela dan lain-lain.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.3.1 Pengertian dan unsur-unsur APBD

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan

sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan Negara, 2002). Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Fozzard, Adrian, 2001).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah (Lasminingsih, 2004).

Menurut Halim (2004), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, " Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah." Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.” Unsur-unsur APBD menurut (Halim ,2004) adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas secara bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

2.3.2 Struktur APBD

Laporan APBD yang memakai format Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, terdiri atas 3 bagian, yaitu: “pendapatan, belanja, dan pembiayaan.” Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan. Belanja pelayanan publik

dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang (Halim, 2004).

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : “pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.” Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006: Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu: klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

- 1) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; tenaga kerja; koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan; pemuda dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; pemerintahan umum; kepegawaian; pemberdayaan masyarakat dan desa; statistik; arsip; dan komunikasi dan informatika.
- 2) klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: pertanian; kehutanan energi dan sumber daya mineral; pariwisata; kelautan dan perikanan; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

- 3) Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: pelayanan umum; ketertiban dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial.
- 4) Belanja menurut kelompok belanja digolongkan menjadi 2 yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung yang dikelompokkan menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- 5) Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan daerah mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulator*). Sebagai pendapatan pajak daerah, setiap pajak harus memenuhi *smith's canons* yang terdiri dari keadilan (*equity*), unsur kepastian (*certainty*), unsur kelayakan (*convenience*), efisien (*efficiency*), dan unsur ketepatan (*adequacy*).

Besarnya tarif pajak daerah ditetapkan melalui peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi dalam 2 jenis meliputi:

- 1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok

- 2) Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil (tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar), dan merupakan pungutan yang sifatnya budgettair tidak menonjol. Retribusi daerah untuk tiap-tiap daerah berbeda-beda jenis dan ragamnya tergantung potensi yang ada di tiap-tiap daerah. Secara umum retribusi dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.5 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. DBH dilakukan berdasarkan

prinsip by origin (daerah penghasil) dan dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Penerimaan negara yang di bagi hasilkan terdiri atas:

1. Penerimaan Pajak

a. PPh Orang Pribadi

Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan

b. Cukai Hasil Tembakau

Penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau dibagikan kepada daerah sebesar 2% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 0,6% untuk provinsi yang bersangkutan
- 2) 0,8% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan
- 3) 0,6% untuk pemerataan kabupaten/kota lainnya

2. Penerimaan Bukan Pajak

a. Sektor Kehutanan

Dana Bagi Hasil sektor kehutanan terdiri atas:

1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
3. Dana Reboisasi (DR).

Bagian daerah dari penerimaan negara iuran hak perusahaan hutan dibagi dengan perincian:

1. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
2. 64% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.

Bagian daerah dari penerimaan negara provisi sumber daya hutan dibagi dengan perincian:

1. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
2. 32% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil

3. 32% untuk daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian kabupaten/kota dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Bagian daerah dari penerimaan yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

b. Sektor Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil sektor pertambangan umum terdiri atas: Penerimaan iuran tetap (*land-rent*), adalah seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan umum, eksplorasi, dan eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan. Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*), adalah iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (*royalty*) satu atau lebih bahan galian. Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum dari Iuran Tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
2. 64% untuk kabupaten/kota penghasil

DBH Pertambangan Umum dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

1. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan.
2. 32% untuk daerah kabupaten/ kota penghasil.
3. 32% untuk daerah kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

c. Sektor Perikanan

Dana Bagi Hasil sektor perikanan berasal dari pungutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan. Bagian daerah dari Dana Bagi Hasil sektor perikanan sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

d. Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dibagi sebagai berikut. Daerah imbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk daerah. Bagian daerah dibagi dengan rincian:

1. 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
2. 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.
3. 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

DBH Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

e. Sektor Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan negara dari pertambangan gas bumi dibagi sebagai berikut. Daerah imbangan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk daerah. Bagian daerah dibagi dengan rincian:

1. 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
2. 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.
3. 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

DBH Pertambangan Gas Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

f. Sektor Pertambangan Panas Bumi

Dana Bagi Hasil sektor pertambangan panas bumi berasal dari setoran bagian pemerintah atau iuran tetap dan iuran produksi. Bagian penerimaan daerah untuk sektor pertambangan panas bumi sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
2. 32% untuk kabupaten/kota penghasil

3. 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

2.6 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 persyaratan untuk memperoleh DAK adalah sebagai berikut:

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh
2. Pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan SDA, DAU, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.
3. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (dikecualikan untuk DAK dari Dana Reboisasi).
4. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan ditetapkan oleh menteri /instansi terkait.

Adapun kriteria pengalokasian DAK meliputi:

1. Kriteria Umum

Sesuai dengan pasal 40 UU Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa alokasi DAK mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhankebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.

2. Kriteria Khusus

Ditetapkan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang meliputi: untuk Provinsi (terdiri dari: daerah

tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata), untuk Kabupaten/Kota (terdiri dari: daerah tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata

3. Kriteria Teknis

Kriteria teknis dirumuskan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait. Kriteria teknis tersebut dicerminkan dengan indikator–indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi saran prasarana pada masing–masing bidang/kegiatan yang akan di danai oleh DAK. Kriteria teknis berdasarkan lingkup kegiatan yaitu, Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan&perikanan, pertanian, lingkungan hidup, prasarana pemerintahan, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, perumahan dan pemukiman, listrik pedesaan, sarana kawasan, transportasi pedesaan, keselamatan transportasi, dan sarana prasarana.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang sebelumnya telah melakukan penelitian terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pertumbuhan Ekonomi dengan keragaman objek penelitian. Adapun uraian dari beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1. Tinjauan Empiris Penelitian

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
1	Nalisis Pengaruh Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Kotamobagu	Metode: Regresi Linier Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>) Variabel: 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Belanja Modal	Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh empat variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dimana didapati secara parsial variabel belanja modal,

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
	Oleh: Andry Mokoginta ¹ , Daisy S.M. Engka ² , Mauna Th. B. Maramis ³ Tahun: 2023	3. Dana Bagi Hasil 4. Dana Alokasi Khusus 5. Dana Alokasi Umum	berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, secara parsial dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya belanja modal, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2	Pengaruh DAU, PAD, DAK Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Jawa Tengah Oleh: Andri Gustaf Eka Saputera, Pandoyo Tahun: 2022	Metode: Regresi Linier Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>) Variabel: 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan Asli Daerah 3. Dana Alokasi Khusus 4. Dana Alokasi Umum	Secara Simultan ketiga variabel Independent yaitu DAU, PAD, dan DAK berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. besaran pengaruh total ketiga variabel Independent ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,2833. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi total pengaruh seluruh variabel Independent terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu sebesar 28,33 persen. Ini berarti pengaruh variabel lain diluar model yang tidak diteliti adalah sebesar 71,67 persen. Seperti Retribusi Daerah, dan Penanaman Modal Asing.
3	Pengaruh Dana Perimbangan (DBH, DAU, & DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan	Metode: Regresi Linier Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>) Variabel: 1. PDRB 2. Dana Alokasi Umum	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Secara parsial DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
	Oleh: Suranto Tahun: 2023	3. Dana Alokasi Khusus 4. Dana Bagi Hasil	Selatan. Secara parsial DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. DAU, DBH, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Dan besarnya pengaruh secara simultan sebesar 92,6%, selebihnya sebesar 7,4% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
4	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh Oleh: ahmah AR dan Drs. Basri Zein M.Si, Ak, CPA Tahun: 2016	Metode: Regresi Linier Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>) Variabel: 1. PDRB 2. Dana Alokasi Umum 3. Pendapatan Asli Daerah 4. Dana Bagi Hasil	Variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014. 2. Variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara masing-masing (parsial) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014. 3. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014. 4. Variabel dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014. 5. Variabel dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014.

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
5	<p>Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Daerah Tertinggal</p> <p>Oleh: Reandy Alvaro</p> <p>Tahun: 2022</p>	<p>Metode: Regresi Linier Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>)</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB 2. Pendapatan Asli Daerah 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus 5. Dana Bagi Hasil 6. Belanja Barang dan Jasa 7. Belanja Modal 8. Dana Daerah Urusan Pendidikan 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa, serta dana urusan pendidikan dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan, dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh. Hasil regresi menunjukkan nilai adjust R sebesar 0,9969 yang berarti variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, belanja barang dan jasa. , belanja modal, dana daerah untuk pendidikan sebesar 99,69 persen. Sedangkan sisanya sebesar 0,31 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.</p>
6	<p>Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon</p> <p>Oleh: Olvy Beatriks Talangamin , Paulus Kindangan , Rosalina A.M. Koleangan</p> <p>Tahun: 2018</p>	<p>Metode: Regresi Linier Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>)</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB 2. Pendapatan Asli Daerah 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus 	<p>Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon. Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah (kuncoro, 2006). Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Menurut</p>

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
7	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara</p> <p>Oleh: Lian Arke Mokorowu , Debby Ch. Rotinsulu , Daisy S.M. Engka</p>	<p>Metode: Regresi Linier Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>)</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB 2. Pendapatan Asli Daerah 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus 5. Dana Bagi Hasil 	<p>Brata (2004) yang dikutip oleh Adi dan Harianto (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan bantuan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>DAK dialokasikan dari APBN pada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus tergantung pada ketersediaan dana APBN. PAD, DBH, DAU dan DAK dalam pembiayaan pembangunan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. dapun hasil penelitian ini adalah PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Minahasa tenggara jika di analisis secara parsial selanjutnya jika di analisis secara simultan maka PAD, DBH, DAU dan</p>
Tahun: 2020			

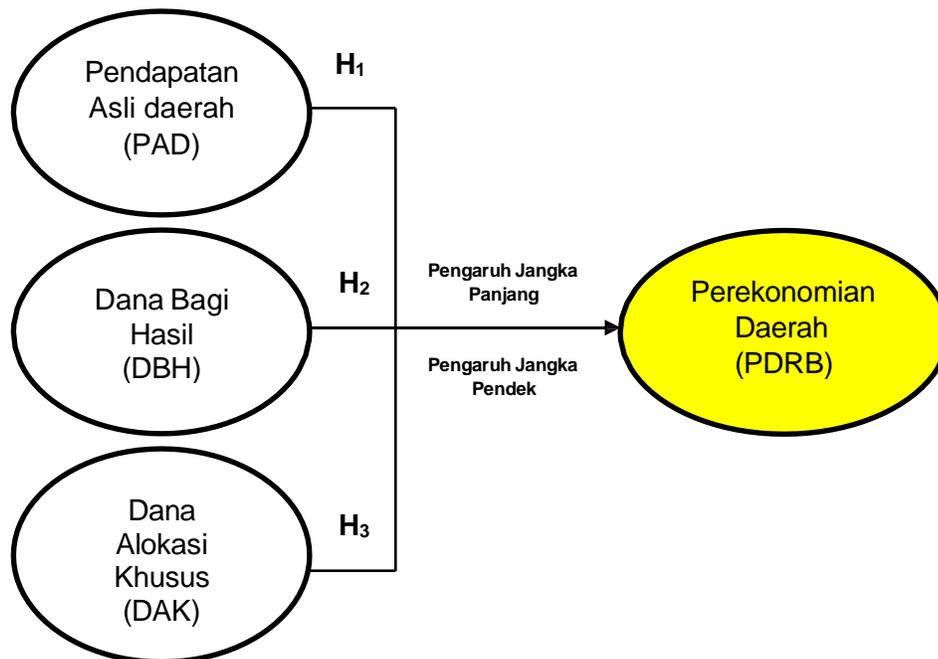
No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
8	<p>Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Aceh</p> <p>Oleh: Iskandar, Irfan dan Bobby Rahman</p> <p>Tahun: 2019</p>	<p>Metode: Regresi Linier Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>)</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Dana Bagi Hasil 	<p>DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di minahasa tenggara.</p> <hr/> <p>Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis <i>eviews</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB, kemudian dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus mempunyai pengaruh yang signifikan. berpengaruh dan positif terhadap PDRB sebesar 0,9871 (89,71%), sedangkan yang dipengaruhi variabel lain di luar model ini sebesar 0,1029 (10,29%).</p>
9	<p>Pengaruh Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun Periode 2017-2022</p> <p>Oleh: Hardiansyah, Usdeldi dan Ferri Saputra Tanjung</p> <p>Tahun: 2023</p>	<p>Metode: Regresi Linier Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>)</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Pendapatan Asli Daerah 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sehingga apabila Pemerintah Daerah tersebut ingin lebih meningkatkan pertumbuhannya maka dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan</p>

No	Judul Penelitian dan Penulis	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian
10	<p>The Effect Of Balanced Fund towards Economic Growth 3 City in South Sulawesi</p> <p>Oleh: Nurfadilah Aris, Sri Astuty dan Andi Samsir</p> <p>Tahun: 2019</p>	<p>Metode: Regresi Linier Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>)</p> <p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Dana Bagi Hasil 	<p>pendapatan asli daerah yang ada di Pemerintahan tersebut perlu diperhatikan. Selain variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah hendaknya Pemerintah Daerah juga memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus signifikan memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di Provinsi Sulawesi Selatan</p>

2.8 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kabupaten Pesisir barat adalah wilayah otonom baru di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat secara resmi berdiri sejak tahun 2012 berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364). Sebelum lahirnya Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, Kabupaten Pesisir Barat masih termasuk wilayah pemerintahan Kabupaten Lampung Barat yang

ibukota kabupatennya di Liwa. Sebagai wilayah baru dugaan awal rendahnya PDRB Kabupaten Pesisir Barat dapat diklaim bahwa belum berkembangnya instrument belanja pemerintah dan pergerakan perekonomian suatu wilayah. Dana Perimbangan, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan instrumen penting bagi perkembangan daerah. Dana ini dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan lokal dalam konteks desentralisasi, termasuk Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Penyerahan dana ini merupakan hasil dari pelimpahan urusan pemerintahan kepada daerah, yang berdasarkan prinsip otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan secara efektif, daerah membutuhkan sumber keuangan yang memadai untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada penduduknya. Menurut Jin dan Zhang (2011), belanja pemerintah daerah yang produktif dapat meningkatkan rasio output terhadap modal, sedangkan belanja yang tidak produktif dapat mengurangi rasio tersebut. Secara singkat penelitian ini memiliki kerangka alur sebagai berikut:



Gambar 5. Kerangka Pemikiran

Kerangka Berfikir diatas mengacu kepada beberapa temuan penelitian dan hubungan variable yang dipakai, Menurut (Bratakusuma & Solihin 2002), Pendapatan Asli

Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di dalam daerah yang bersangkutan dan digunakan untuk mendukung kegiatan lokal. Peningkatan PAD menandakan tingginya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Darise (2009) menekankan perlunya terus meningkatkan PAD sebagai sumber pendapatan daerah, agar dapat membiayai sebagian besar kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini penting untuk menjaga kemandirian dan tanggung jawab otonomi daerah yang lebih luas dan nyata. Desentralisasi fiskal mampu memberikan dorongan kepada daerah untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki sehingga tercapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat (Woyanti, 2013). (Putri, 2015), menemukan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Tingginya nilai PAD suatu daerah mencerminkan bahwa daerah tersebut mampu mengelola potensi daerah yang dimiliki

Bugis (2012) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) adalah hak daerah untuk mengelola sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasikan. Sumber-sumber ini termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Studi Bugis menemukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa jika nilai pendapatan sebuah wilayah meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Sumber pendapatan daerah yang sangat potensial, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari, 2015) juga menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal.

PAD dan sumbangan dan bantuan alokasi khusus adalah dua bagian penerimaan daerah yang berdampak positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah,

menurut Brata (2004). Sumbangan dan bantuan adalah dana yang diberikan untuk kepentingan daerah seperti pembagian dana umum melalui bank, pemberian kredit, dan pembagian dana khusus untuk kepentingan daerah. Ada kemungkinan bahwa alokasi pembiayaan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, yang pada gilirannya akan menguntungkan masyarakat melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal (Rumere, 2022b; Sugiyanto et al., 2018). (Mochamad Gatot Awaludin, Puji Wibowo, 2023). Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD, DAK Fisik, dan Dana Desa secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. PAD memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap PDRB tetapi tidak terhadap kemiskinan; DAK Fisik tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, dan Dana Desa memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap kemiskinan dan pengaruh yang signifikan positif terhadap perekonomian.

2.9 Hipotesis Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup penting dalam membiayai belanja pemerintah daerah guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Mardiasmo (2002) dalam Prakarsa (2014) menyebutkan bahwa upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang merupakan tujuan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dengan meningkatnya kemandirian suatu daerah melalui peningkatan PAD dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, sebaliknya jika PAD rendah maka pertumbuhan ekonomi juga rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabilla & Sumarsono (2022) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Dari uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut.

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Barat.

2. Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah daerah sebagai sebuah lembaga (*steward*) yang diberikan kepercayaan untuk mengelola penerimaan daerah melalui dana perimbangan sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gulo (2022) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Dari uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut.

H₂: Dana Bagi Hasil (DBH) dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Pesisir.

3. Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama dari DAU adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Penggunaan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus kepuasan masyarakat dimana pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, besarnya DAU yang diterima suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan Awaludin & Wibowo (2023) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dari uraian di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut.

H₃: Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Barat.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, Pendekatan deskriptif untuk menggambarkan pengaruh yang dihasilkan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Data yang digunakan berbentuk data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari, Badan Pusat Statistik kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung dengan platform, <https://pesisirbaratkab.bps.go.id/>, serta berbagai terbitan publikasi yang relevan dengan sumber data. Pada Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa pembagian menjadi 4 Kuartal dengan data kuartal 1 sampai 4 selama 9 Tahun runtut waktu (*time series*) dari periode 2014: Kuartal 1 – 2023: Kuartal 4 total observasi sebanyak 40, dan Wilayah Penelitian pada Kabupaten Pesisir Barat.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Penelitian

1. PDRB Lapangan usaha atas dasar harga Konstan

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas harga konstan adalah salah satu metrik yang digunakan dalam ekonomi untuk mengukur nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau negara dalam satu periode waktu tertentu, dengan memperhitungkan inflasi atau perubahan harga. Dalam konteks ini, variabel PDRB atas harga konstan mengacu pada nilai PDRB yang disesuaikan dengan harga tahun dasar atau harga konstan, sehingga perubahan nilai PDRB tidak

dipengaruhi oleh perubahan harga. Nilai dari variabel PDRB dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Barat periode 2014-2023.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nilai dari variabel Pendapatan Asli Daerah dilihat dari pos Pendapatan Asli Daerah dalam laporan realisasi APBD Kabupaten Pesisir Barat periode 2014-2023.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) alokasi dana yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal. Dana ini merupakan bagian dari sistem transfer keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik di tingkat regional. Nilai dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Pesisir Barat dilihat dari pos pendapatan transfer dalam laporan realisasi APBD Kabupaten Pesisir Barat periode 2014-2023.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak

termasuk penyertaan modal. Nilai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Pesisir Barat dilihat dari pos pendapatan transfer dalam laporan realisasi APBD Kabupaten Pesisir Barat periode 2014-2023.

3.2.2 Definisi Operasional Variabel

Tabel 2. Variabel, Simbol, satuan dan Sumber Data

No	Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
1	Produk Domestik Regional Bruto	PDRB	Milliar Rupiah	Badan Pusat Statistik Pesisir Barat https://pesisirbaratkab.bps.go.id/
2	Pendapatan Asli Daerah	PAD	Milliar Rupiah	Badan Pusat Statistik Pesisir Barat https://pesisirbaratkab.bps.go.id/
3	Dana Bagi Hasil	DBH	Milliar Rupiah	Badan Pusat Statistik Pesisir Barat https://pesisirbaratkab.bps.go.id/
4	Dana Alokasi Khusus	DAK	Milliar Rupiah	Badan Pusat Statistik Pesisir Barat https://pesisirbaratkab.bps.go.id/

3.3 Metode Statistik Penelitian

Model regresi berganda adalah model regresi yang terdiri dari lebih dari satu variabel independen. Untuk mendapatkan garis regresi yang baik yang terjadi jika nilai prediksinya sedekat mungkin dengan data aktualnya atau nilai β_0 dan β_1 yang menyebabkan residual sekecil mungkin dapat digunakan metode kuadrat terkecil *OLS* (*Ordinary Least Square*). Metode kuadrat terkecil hanya dapat digunakan jika semua data yang digunakan di dalam model stasioner, jika data tidak stasioner maka model yang digunakan adalah model koreksi kesalahan (*Error Correction Model*). *Error Correction Model* (*ECM*) adalah model yang memasukkan penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi ketidak seimbangan. Model ECM pertama kali diperkenalkan oleh Sarga dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hendry dan

akhirnya dipopulerkan oleh Engle-Granger. Model ECM mempunyai beberapa kegunaan, namun penggunaan yang paling utama adalah di dalam mengatasi masalah data time series yang tidak stasioner dan masalah regresi lancung (Widarjono. 2013).

3.3.1 Uji *Stationary*: Uji Akar Satuan (*Unit Root Test*)

Deret waktu adalah suatu himpunan pengamatan yang diperoleh pada titik waktu yang berbeda dengan selang waktu yang sama dan barisan data diasumsikan saling berhubungan satu sama lain (Box and Jenkins, 1994). Uji Stasioneritas Untuk menguji kestasioneran data time series dilakukan dengan metode pengujian akar-akar unit (unit root test). Unit root test dikembangkan oleh Dickey-Fuller atau yang lebih dikenal sebagai Augmented Dickey-Fuller (ADF) test dengan memakai model yang menggunakan intercept dan trend, secara matematik persamaan uji stasioner dilambangkan sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + \alpha_i + \alpha_i \sum_{i=1}^m \Delta Y_{t-1} + \mu_t$$

Dimana:

- μ_t : Nilai Residual persamaan ADF
- δ : Parameter lag pertama Y_{t-1}

Pada umumnya data ekonomi *time-series* seringkali tidak *stationary* pada level series, jika hal ini terjadi, maka kondisi *stationary* dapat dicapai dengan melakukan differensiasi satu kali atau lebih. Apabila data telah *stationary* pada level series, maka data tersebut adalah *integrated of order zero* atau I(0). Apabila data *stationary* pada *first difference* level, maka data tersebut adalah *integrated of order one* I(1). pengujian unit root dalam penelitian ini akan menggunakan *Augmented Dickey Fuller*(ADF) untuk menguji *stationary* masing-masing variabel.

Pengujian pada masing-masing variabel dimulai dengan pengujian pada ordo level. Jika data tidak *stationary* pada ordo level, maka dilakukan pengujian tingkat integrasi (*1st difference*) untuk melihat *stationary* data pada ordo ini. Hasil dari uji tersebut dibandingkan dengan McKinnon Critical Value. Data dikatakan *stationary* apabila *Test critical values* lebih besar dari *Augmented Dickey Fuller* (ADF) *test statistic*

artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, begitupun sebaliknya. Hasil uji analisis dilakukan dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 5 persen. Hipotesis yang digunakan dalam uji *stationary* yaitu:

$H_0 : \rho = 1$, ada unit root atau data tidak *stationary*, sedangkan

$H_a : \rho < 1$, tidak ada unit root atau data *stationary*.

3.3.2 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada atau tidak hubungan jangka panjang pada setiap variabelnya. Syarat utama dari sebuah hubungan jangka panjang adalah semua variabel yang digunakan dalam model harus dalam kondisi stasioner dalam derajat integrasi yang sama. Dalam rangka melakukan pengujian kointegrasi digunakan uji Augmented Eagle-Granger yang juga memanfaatkan uji ADF. dari masing-masing peubah bebas terhadap peubah terikat (Satria, 2004). Adapun model persamaan jangka panjang berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \dots + \beta_{nt} X_{nt} + \mu_t$$

Dimana:

- Y_t : Variabel dependen
- β_0 : Konstanta
- β_1 : Koefisien Variabel Independen
- X_t : Variabel Independen
- μ_t : Error Term
- t : Menunjukkan data Time Series

Untuk persamaan regresi jangka pendek dari model ECM dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta X_{1t} + \beta_2 \Delta X_{2t} + \dots + \beta_{nt} \Delta X_{nt} + \beta_n \mu_{t-1} + \varepsilon_t$$

Dimana:

- ΔY_t : Selisih nilai Variabel Y_{t-1}
- ΔX_t : Selisih nilai Variabel X_{t-1}
- β_0 : Konstanta Model ECM
- β_1 : Koefisien Variabel Independen
- μ_{t-1} : Error Term white noise
- ε_t : Nilai residual model ECM

Uji kointegrasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji *Eagle-Granger* (EG) dan untuk mendapatkan nilai EG data yang digunakan harus sudah berintegrasi pada derajat yang sama. Hasil pengujian OLS pada suatu persamaan kemudian ditaksir menggunakan model persamaan *autoregressive* dari residual berdasarkan persamaan berikut:

$$\Delta\mu_t = \Delta\mu_{t-1} + \Delta I \sum_{i=1}^m \Delta\mu_{t-1}$$

Dengan uji hipotesisnya sebagai berikut:

Ho = $\mu = \text{level (1)}$, artinya tidak ada kointegrasi
 Ha = $\mu \neq \text{level (1)}$, artinya ada kointegrasi

3.4 Uji Asumsi Klasik

Model regresi dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). BLUE dapat dicapai bila memenuhi Uji Asumsi Klasik. Ada empat uji asumsi klasik harus dilakukan terhadap suatu model regresi tersebut, yaitu :

3.4.1 Uji Normalitas

Dalam Widarjono (2013) salah satu asumsi penting dalam metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lain. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual dari suatu model regresi terdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque –Bera* (JB). Menerima atau menolak hipotesis awal dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas.

1. H₀: Data terdistribusi normal (probabilitas > $\alpha = 5\%$)
2. H_a: Data tidak terdistribusi normal (probabilitas < $\alpha = 5\%$)

Jika probabilitas lebih besar dari *alpha* ($\alpha = 5\%$) maka menerima hipotesis nol (H₀) yang artinya data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil dari *alpha* ($\alpha = 5\%$) maka menerima hipotesis satu (H_a) yang artinya data tidak terdistribusi normal.

3.4.2 Uji Multikolinearitas

Dalam Widarjono (2013) Multikolinieritas merupakan terdapatnya hubungan antara variabel independen dalam suatu regresi. Hubungan linier antara variabel independen dalam regresi berganda dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna (*perfect*) dan hubungan linier yang kurang sempurna (*imperfect*). Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator BLUE tetapi menyebabkan suatu model memiliki varian yang besar. Kecepatan kenaikan varian dan kovarian dapat diamati dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). VIF menunjukkan bagaimana varian dari estimator menaik (*inflating*) dengan adanya multikolinieritas. Jika varian terus naik atau membesar karena ada multikolinieritas maka *standard error* juga naik. Mendeteksi multikolinieritas dilakukan dengan beberapa metode :

1. Nilai R^2 tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan.
2. Menghitung korelasi parsial antara variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi rendah maka tidak terdapat multikolinieritas
3. Melakukan regresi auxiliary
4. Melakukan metode deteksi klien

Variance Inflation Factor dan *Tolernace*. Jika nilai VIF semakin membesar maka di deteksi ada multikolinieritas dalam model regresi tersebut.

3.4.3 Uji Heterokedastisitas

Dalam Widarjono (2013) metode OLS mengasumsikan bahwa variabel gangguan mempunyai rata-rata nol, mempunyai varian yang konstan dan variabel gangguan tidak saling berhubungan antara satu observasi dengan observasi lainnya sehingga menghasilkan OLS yang BLUE. Dalam heteroskedastisitas, model regresi tidak memiliki varian yang konstan dengan demikian adanya heteroskedastisitas menyebabkan estimator tidak lagi mempunyai varian yang minimum. Jadi dengan adanya heteroskedastisitas, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) hanya *Linear Unbiased Estimator* (LUE). Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas

yaitu melalui metode informal, metode park, metode Glejser, metode Korelasi Spearman, Metode *GoldFeld-Quandt*, Metode *Breusch-Pagan* dan metode *white*.

3.4.4 Uji Autokorelasi

Dalam Widarjono (2013) salah satu asumsi penting dalam metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan lain. Sedangkan autokorelasi merupakan adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antar satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Jadi dengan adanya autokorelasi, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) hanya *Linear Unbiased Estimator* (LUE). Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi yaitu melalui metode *Durbin-Watson*, Metode *Breusch-Godfrey*.

3.5 Ordinary Last Square (OLS)

Jika data sudah stasioner pada tingkat level, maka metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square = OLS*) dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linier berganda. Regresi adalah studi bagaimana pengaruh satu variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui. Model regresi berganda adalah model regresi yang terdiri dari lebih dari satu variabel independen. Metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square = OLS*) adalah metode yang dapat digunakan mendapatkan garis regresi yang baik yang terjadi jika nilai prediksinya sedekat mungkin dengan data aktualnya atau nilai β_0 dan β_1 yang menyebabkan residual sekecil mungkin (Widarjono. 2013). Model ekonometrika dengan metode kuadrat terkecil OLS (*Ordinary Least Square*) sebagai berikut:

$$\text{PDRB}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{PAD}_t + \beta_2 \text{DBH}_t + \beta_3 \text{DAK}_t + et$$

Dimana:

- PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 DBH : Dana Bagi Hasil
 DAK : Dana Alokasi Khusus
 t : Periode penelitian Tahun 2014 Kuartal 1 - 2023 Kuartal 4 (*time Series*)
 β_0 : Koefisien Konstanta intersep yang merupakan skalar
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi atau slop kemiringan dari masing-masing variabel
 et : Standar error pada model matematis (*Error Term*)

3.6 Error Correction Model (ECM)

Jika data tidak stasioner pada tingkat level, tetapi stasioner pada tingkat diferensi dan kedua variabel terkointegrasi atau dengan kata lain mempunyai hubungan atau keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka pendek mungkin saja ada ketidakseimbangan. Artinya, bahwa apa yang diinginkan oleh pelaku ekonomi belum tentu sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. Adanya perbedaan apa yang diinginkan pelaku ekonomi dan apa yang terjadi maka diperlukan adanya penyesuaian. Model yang memasukkan penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi ketidakseimbangan disebut sebagai Error Correction Model/ECM (Widarjono. 2013). Analisis ECM digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Model ekonometrika dengan teknik *Error Correction Model (ECM)* sebagai berikut:

$$D(\text{PDRB})_t = \beta_0 + \beta_1 D(\text{PAD})_t + \beta_2 D(\text{DBH})_t + \beta_3 D(\text{DAK})_t + ect(-1)$$

Dimana:

- PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 DBH : Dana Bagi Hasil
 DAK : Dana Alokasi Khusus
 t : Periode penelitian Tahun 2014 Kuartal 1 - 2023 Kuartal 4 (*time Series*)
 β_0 : Koefisien Konstanta intersep yang merupakan skalar
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi atau slop kemiringan dari masing-masing variabel
 D : Hubungan jangka pendek Koefisien regresi atau slop kemiringan dari

ect : masing-masing variabel
 : *Error Correction term*

3.7 Pengujian Hipotesis Penelitian

3.7.1 Uji t (t-test)

Uji t-Statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Digunakan uji 1 arah dengan tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat $\alpha = 0,05$. Hipotesis pengujian sebagai berikut:

- 1) Jika nilai t-hitung $>$ nilai t-tabel maka H_0 ditolak atau menerima H_a , artinya variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat.
- 2) Jika nilai t-hitung $<$ nilai t-tabel maka H_0 diterima atau menolak H_a , artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Hipotesis uji t yang terbentuk sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. $H_0 ; \beta_1 = 0$, Pendapatan Asli Daerah jangka panjang dan jangka pendek tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
 - b. $H_a ; \beta_1 > 0$, Pendapatan Asli Daerah dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
2. Dana Bagi Hasil
 - a. $H_0 ; \beta_2 = 0$, Dana Bagi Hasil dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto..
 - b. $H_a ; \beta_2 > 0$, Dana Bagi Hasil dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

3. Dana Alokasi Khusus

- a. $H_0 : \beta_3 = 0$, Dana Bagi Hasil dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
- b. $H_a : \beta_3 > 0$, Dana Bagi Hasil dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.05 dan dengan derajat kebebasan ($df = n-k$), dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel (terikat dan bebas) yang digunakan. Maka dapat dirumuskan kriterianya adalah apabila nilai t -hitung lebih besar ($>$) dari t -tabel maka gagal menerima H_0 , sebaliknya apabila nilai t -hitung lebih kecil ($<$) t -tabel maka berhasil menerima H_0 . Atau dapat melihat nilai probabilitas, apabila nilai probabilitas $> \alpha = 0.05$ maka gagal menerima H_0 , sebaliknya jika nilai probabilitas < 0.05 maka gagal menolak H_0 .

3.7.2 Uji F Statistik

Uji-F adalah uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji-F ini dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan derajat kebebasan $df_1 = (k)$ dan $df_2 = (n-k-1)$ ($n =$ jumlah observasi, $k =$ jumlah variabel bebas). Hipotesis yang digunakan:

$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana alokasi Khusus (DAK) dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap Produk Domestik regional Bruto (PDRB).

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana alokasi Khusus (DAK) dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap Produk Domestik regional Bruto (PDRB).

Kriteria Pengujian:

- 1) Apabila F statistik $> F$ tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila F statistik $< F$ tabel maka H_o diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pada tingkat $\alpha = 0,05$ jika H_o ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika H_o diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pada $\alpha = 0,05$. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan ($df_1 = k$) dan ($df_2 = (n-k-1)$), dimana k adalah jumlah variabel bebas yang digunakan dan n adalah jumlah observasi. Kriterianya apabila F – hitung lebih kecil ($<$) dibandingkan F tabel maka H_o diterima dan H_a ditolak, artinya secara simultan variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya apabila F – hitung lebih besar ($>$) dibandingkan F tabel maka H_o ditolak dan H_a diterima, artinya secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Atau dapat melihat nilai probabilitas, apabila nilai probabilitas $< 5\%$ maka gagal menerima H_o , sebaliknya jika nilai probabilitas $> 5\%$ maka gagal menolak H_o .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat. Analisis dilakukan dengan data 4 Kuartal dengan data kuartal 1 sampai 4 selama 9 Tahun runtut waktu (*time series*) dari periode 2014: Kuartal 1 – 2023: Kuartal 4. Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diajukan, dan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada hubungan jangka panjang terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dan tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada hubungan jangka pendek terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Pesisir Barat sepanjang tahun 2014 : Kuartal 1- 2023 kuartal 4.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada hubungan jangka panjang terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada hubungan jangka pendek terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Pesisir Barat sepanjang tahun 2014 : Kuartal 1- 2023 kuartal 4.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada hubungan jangka panjang terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada hubungan

jangka pendek terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Pesisir Barat sepanjang tahun 2014 : Kuartal 1- 2023 kuartal 4.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama pemerintah daerah Pesisir Barat antar organisasi perangkat daerah (OPD) sangat lah penting. Kerjasama ini dapat berupa intervensi program-program optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang potensial seperti pariwisata berbasis alam dan budaya, agribisnis, serta industri kreatif hal ini dapat dilakukan secara bersama oleh dinas Pariwisata, Dinas pertanian, Dinas perikanan, Dinas perdagangan, Dinas koperasi dan UMKM. Dalam hal investasi untuk keberlangsungan sektoral yang dilakukan Diversifikasi ekonomi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat mengambil peran penting dalam membantu mencari sumber-sumber kerjasama dan pendanaan modal. Organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus mampu menciptakan program-program pengembangan Diversifikasi ekonomi, Hal ini tidak hanya menambah sumber PAD tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi pasar di Kabupaten Pesisir Barat.
2. Manfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pertumbuhan Jangka Pendek dan Panjang: DBH telah terbukti memiliki dampak positif pada PDRB dalam kedua jangka waktu, jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkannya secara efektif.
 - a) Prioritaskan alokasi DBH untuk proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Pada realisasi DBH pemerintah Pesisir Barat dapat melakukan monitoring pengelolaan dana dan proyek dengan mengikutsertakan OPD seperti dinas pekerjaan umum dan penataan

ruang (PUPR), dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan dinas perhubungan.

- b) Dukung program-program pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan, seperti pelatihan kewirausahaan, pembinaan usaha kecil dan menengah (UKM), dan akses ke pasar untuk produk-produk lokal. Dinas UMKM dan dinas perdagangan dapat mengambil peran penting dalam program-program ini.
3. Kelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Efektif: DAK memiliki pengaruh yang signifikan pada PDRB di kedua jangka waktu, menunjukkan pentingnya manajemen yang efektif terhadap alokasi dana ini.
- a) Pastikan bahwa DAK dialokasikan untuk proyek-proyek yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan.
 - b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek DAK untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana tersebut.

Pengelolaan dana alokasi khusus yang efektif, efisien dan tepat untuk kebutuhan pembangunan Pesisir Barat sangatlah penting, hal ini dibutuhkan sinergi dan intervensi antar OPD untuk ikut serta dalam hal penyusunan, proses, hasil, pengembangan dan monitoring proyek. beberapa OPD yang dapat berperan penting seperti badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, badan pendapatan daerah dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat.
- Agus Widarjono. (2013). Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya, Ekonosia, Jakarta.
- Aji, F. B., & Nugroho, S. B. M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1).
- Aladejare, S. A. (2013). Government Spending and Economic Growth: Evidence from Nigeria. In *Munich Personal RePEc Archive* (Vol. 4, Issue 43916). <http://ideas.repec.org/p/pramprapa/43916.html>
- Andry Mokoginta, Daisy S.M. Engka, Mauna Th. B. Maramis, (2023) Analisis Pengaruh Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol 24 No 3 (2023).
- Anggoro, D.D., (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. Universitas Brawijaya Press.
- Anggraeni, Unun Dian dan Suhardjo, Yohanes. (2010). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. *Solusi*, Vol. 9 No. 1, Januari 70 2010 : 69 –81.
- Apriani, W., Suprijanto, A., & Prananditya, A. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. *Journal Of Accounting*, 3(3).

- Arham, M. A., Kamuli, S., & Payu, B. R. (2018). Kebijakan Fiskal (Transfer Dana Desa), Ketimpangan dan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia. Laporan Akhir Penelitian Berbasis Kompetensi. Universitas Negeri Gorontalo.
- Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Bonner, Rivera, & Zimmerman, B. J. (1997). Part 1: General Theories and Models of Self-Regulation. The Handbook of Self Regulation,
- Brata, KUSUMA. (2004). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bratakusuma Deddy S., Solihin Dadang. (2002). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bugis, (M. 2012). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Periode Tahun 2002-2009. ManeksiJurnal Manajemen Ekonomi & Akuntansi Vol 1 No 1 Ambon Desember 2012 ISSN 2302-9560.
- Darise, Nurlan. (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi kedua. Penerbit PT.Indeks. Jakarta.
- Dayana Novita Candra Kumala, Moh. Khusaini, (2018) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal (Studi Kasus Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). Jurnal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2018.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management,. 16: 49-64
- Etik Winarni, Yolanda Sari, Muhammad Amali, (2023). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap PDRB Perkapita Provinsi Jambi. Ekonomis: Journal of Economics and Business Volume 7, No 2 (2023), September, 1182-1188 Online ISSN: 2597-8829, DOI: 10.33087/ekonomis.v7i2.1394

- Feronika, (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bitung, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 18, No. 5.
- Fuad, K., & Hapsari, N. N. (2020). Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 13(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v13i2.7433> .
- Fozzard, Adrian. (2001). The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147.
- Gunantara, Putu Chandra. & Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.3 ISSN 2302-8556.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN)*. Jawa Timur: UPN Veteran.
- Heliyanto, Firnandi. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Pada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4 (3), 24 - 40.
- Iskandar, Irfan dan Bobby Rahman, (2019). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan | Volume 5 | Nomer 3 | November 2019*.
- Jin, Tao., and Jianzhui Xhang. (2011). Effect of Local Government Expenditure on the Ratio of Output to Capital: Evidence from Panel Data at China's Provincial Level. *Frontiers of Economics in China* Vol 6 (2) pp 249-270.
- Kresnandra, A. A. N. A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Dana Perimbangan dan Investasi Swasta sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* volume 3 (2).

- Kusumawati, Lily dan I Gusti Bagus Wiksuana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vo. 7. No. 5.
- Lasminingsih. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Daerah*, Jakarta : Agro Media.
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158.
- Martinez-Vazquez dan McNab. (2001). *Fiscal Decentralization: Issues in Theory and Challenges in Practice*. Georgia: Georgia State University.
- Mochamad Gatot Awaludin, Puji Wibowo, (2023) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan Pdrb Daerah Tertinggal. *JURNALKU Volume 3 No.4*, 2023.
- Mokorowu, L. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, volume 21 (04). DOI: doi.org/10.35794/jpek.d.32839.21.4.2020.
- Mulyanto. (2007). *Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Muti'ah. (2017). The Effect of Regional Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Regional Economic Growth (Empirical Study In the 33 provinces in Indonesia Year 2011-2014). *Research Journal of Finance and Accounting*, 8(8), 102–112. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/36777>
- Nasution, Hendry Sulaiman. (2010). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto era Desentralisasi Fiskal di Propinsi Banten Periode 2001:1-2009:4. *Media Ekonomi Vol 18 No 2 Agustus*.
- Nur Arifah, B. S., Abdul, B., & Sahibzada Muhammad, H. (2016). The Role of Tax on Economic Growth. *International Journal of Accounting & Business Management*, 4(2), 242–250. <https://doi.org/10.24924/ijabm/2016.11/v4.iss2/242.250>

- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National tax journal*, 46(2), 237-243.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. In *Journal of Economic Literature* (Vol. 37, Issue 3).
<http://www.jstor.org/stable/2564874?origin=JSTOR-pdf>
- Oates, W. E. (2006). On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization. In *IFIR WorkingPaper Series* (No. 2006-05).
<https://martin.uky.edu/sites/martin.uky.edu/files/IFIR/Pub/ifir-wp-2006-05.pdf>
- Paat, D. C., Koleangan, R. A., & Rumat, V. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(1).
- Permatasari, Isti. (2015). "Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur." STIESIA Surabaya.
- Putri, Z. E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2).
- Putri, Z. E. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Esensi*, 5(2), 173-186.
<https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2340>
- Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kudhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 37-56.
- Putra, Putu Gede W, dkk. (2015). "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11 (3) : 863-877. ISSN: 2302- 8556
- Riyadi dan Bratakusumah, Dedy. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rosen, H. S. (2002). *Public Finance*. New York: McGraw - Hill.

- Rumere, V., Sugiyanto, C., & Sulistyningrum, E. (2022). The Impact of Special Autonomy on Education and Health Outcomes. *Journal of Economics and Policy*, 15(2), 114–138. <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i1.32301>.
- Rustan, A. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi serta kaitannya dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, volume 9 (3). Kalimantan Timur: PKP2A III Lembaga Administrasi Negara. DOI: <https://doi.org/10.24258/jba.v9i3.124>.
- Sinaga, B. N. P. D. (2005). *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha*, 2(1), 65–89. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.237>
- Sugiyanto, E., Suharyono, S., Digdowiseiso, K., Waluyo, T., & Setiawan, H. D. (2018). The effects of specific allocation fund (DAK) on local economic development: A Mixed method analysis on central Java Province, Indonesia. *Journal of Applied Economic Sciences*, 13(8).
- Sun'an, M. & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tambunan, T. T. (2015). *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Vidyattama, Yogi. (2010). A Search for Indonesia's Regional Growth Determinants. *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 27, No. 3 Desember pp. 281-294.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>.
- Widayat, Wahyu, (1994), “Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, STIE YKPN, XXI/No. 3.
- Woyanti, Nenek. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan UMP terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Pra dan Pasca Desentralisasi Fiskal. *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 28, No. 2.

Zhang, T., & Zou, H. F. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of public economics*, 67(2), 221-240.
[https://doi.org/10.1016/S00472727\(97\)00057-1](https://doi.org/10.1016/S00472727(97)00057-1).

Zulfa Eliza , Said Muhammad , Muhammad Nasir, (2014), Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Pdrb Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Volume 2, No. 1, Februari 2014.

